



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara asal-usul anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir KP Beringin 20-08-1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di RT 008, RW 006, Desa Tingkok, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Rokan Hulu, No. Hp/Wa: +62851-8245-9540, Email: xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, NIK xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Siadam 15-11-1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT 008, RW 006, Desa Tingkok, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Rokan Hulu;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ppg, tanggal 05 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam diwilayah

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada tanggal 07-10-2014, yang menjadi wali nikah adalah Rusdi (Wali hakim, karena waktu itu Pemohon I dan Pemohon II tidak diresdai oleh ayah kandung Pemohon II) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama : Awal dan Rusman dengan Mas Kawin berupa Seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *Jejaka* dan Pemohon II berstatus *Gadis*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai orang anak, bernama:
  - 3.1. Lukman Nasution bin Nasrin Mahmud, Lahir: 23-12-2016;
  - 3.2. Adelia Nursaidah Nasution binti Nasrin Mahmud, Lahir 23-01-2018;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 08 November 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, dengan wali nikah bernama Ali Imran Harahap (Ayah Kandung Pemohon II) dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Saruddin dan Budi, serta Mas Kawin berupa 3 Gram emas, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 08-11-2019, Nomor : 330/10/XI/2019;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak lagi, bernama Zahra Safia Fatimah binti Nasrin Mahmud, Lahir 22-08-2023;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - 2.1. Lukman Nasution bin Nasrin Mahmud, Lahir: 23-12-2016;
  - 2.2. Adelia Nursaidah Nasution binti Nasrin Mahmud, Lahir 23-01-2018;
  - 2.3. Zahra Safia Fatimah binti Nasrin Mahmud, Lahir 22-08-2023

adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 330/10/XI/2019, tanggal 08-11-2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 06/SKK/I-1/2019, tanggal 20 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Bidan Rina Friska S, Amd Keb, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ppg



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 07/SKK/I-1/2019, tanggal 2 September 2019 yang dikeluarkan oleh Bidan Rina Friska S, Amd Keb, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 51/Bides-SM/VIII/2024, tanggal 25 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidan Arjuna Nasution, Amd.Keb, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

#### 5. Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK 1406104107850083, tempat dan tanggal lahir Rokan Hulu 01-07-1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT 002, RW 006, Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu itu adalah bapak Rusdi, karena ayah kandung Pemohon II saat itu tidak merestui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Awal dan bapak Rusman;
- Bahwa maharnya berupa emas seberat dua emas;

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ppg



- Bahwa sebelum menikah Pemohon II berstatus gadis sedangkan Pemohon I berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Lukman Nasution, Adelia Nursaidah Nasution, dan Zahra Safia Fatimah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai, xxxxxxxx xxxxx xxxx pada tanggal 8 November 2019;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

**2. SAKSI 2**, NIK 1406032010740003, tempat dan tanggal lahir Batang Samo Hulu 20-10-1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT 001, RW 006, Desa Suka Maju, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Rokan Hulu telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu itu adalah bapak Rusdi, karena ayah kandung Pemohon II saat itu tidak merestui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Awal dan bapak Rusman;
- Bahwa maharnya berupa emas seberat dua emas;

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon II berstatus gadis sedangkan Pemohon I berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Lukman Nasution, Adelia Nursaidah Nasution, dan Zahra Safia Fatimah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx pada tanggal 8 November 2019;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya ingin agar anak Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sebagai anak yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu penetapan asal usul

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ppg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan pengesahan terhadap anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing bernama Lukman Nasution, Adelia Nursaidah Nasution, dan Zahra Safia Fatimah, Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran anak-anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 09 Agustus 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabuppaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang menerangkan bahwa anak yang bernama Lukman Nasution merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 23 Desember 2016, bukti tersebut merupakan surat dibawah tangan, bukan akta otentik, selanjutnya dikategorikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang menerangkan bahwa anak yang bernama Adelia Nursaidah Nasution merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 23 Januari 2018, bukti tersebut merupakan surat dibawah tangan, bukan akta otentik, selanjutnya dikategorikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang menerangkan bahwa anak yang bernama Zahra Safia Fatimah merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2023, bukti tersebut merupakan surat dibawah tangan, bukan akta otentik, selanjutnya dikategorikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Pemohon II adalah wanita yang melahirkan anak-anak yang bernama Lukman Nasution, Adelia Nursaidah Nasution, dan Zahra Safia Fatimah, dan Pemohon I adalah suami Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan pada tanggal 07 Oktober 2014;

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebelum menikah Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon II berstatus jejaka;
4. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Lukman Nasution, Adelia Nursaidah Nasution, dan Zahra Safia Fatimah;
5. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau pada tanggal 08 November 2019;
6. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *al-fiqh al-islami wa adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut:

يثبت النسب بأحد طرق ثلاثة وهي : الزواج الصحيح او الفاسد و الاقرار بالنسب والبيئة

Artinya: *Nasab bisa ditetapkan keabsahannya melalui tiga hal, yaitu: pernikahan yang sah ataupun pernikahan yang fasid, pengakuan dan bukti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan, maka unsur pertama harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan asal usul anak oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dapat diartikan Pemohon I dan Pemohon II mengakui telah memiliki tiga anak yang masing-masing bernama Lukman Nasution, Adelia Nursaidah Nasution, dan Zahra Safia Fatimah, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Lukman Nasution, Adelia Nursaidah Nasution, dan Zahra Safia Fatimah, maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melindungi dan menghilangkan *kemadharatan* bagi anak yang terlahir dari perkawinan liar yang tidak dapat diitsbatkan, Surat

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ppg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tersebut memberi solusi bahwa untuk menjamin dan memberi keadilan bagi anak, maka dapat diajukan perkara asal-usul anak;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa salah satu upaya jaminan perlindungan anak adalah dengan menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan pertumbuhan kehidupan anak. Ketidak-jelasan status anak adalah salah satu bentuk *kemadharatan* bagi pertumbuhan anak. Oleh karena itu, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa menghilangkan *madharat* bagi anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sirri, harus diprioritaskan dan dilindungi, demi terwujudnya kepastian hukum status anak. Dalam konteks perkara ini, anak yang terlahir dari perkawinan siri, dapat dinyatakan sebagai anak sah, yang merupakan hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan tersebut, permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak yang telah dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan, anak-anak yang bernama Lukman Nasution, Adelia Nursaidah Nasution, dan Zahra Safia Fatimah harus dihukumi anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan asal usul anak adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak-anak bernama:
  - 2.1. Lukman Nasution bin Nasrin Mahmud, Lahir: 23-12-2016;
  - 2.2. Adelia Nursaidah Nasution binti Nasrin Mahmud, Lahir 23-01-2018;
  - 2.3. Zahra Safia Fatimah binti Nasrin Mahmud, Lahir 22-08-2023

adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Hakim Tunggal Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H., dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edlerman, A.Md., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ppg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Edlerman, A.Md.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2	PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
3	Proses	:	Rp80.000,00
5	Meterai	:	Rp10.000,00
6	Redaksi	:	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ppg